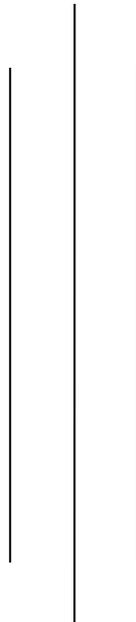




LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2020
(AUDITED)



PEMERINTAH KOTA BEKASI



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.

NIP. 19650205 199011 2 002





Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Tabel	vi
Pernyataan Tanggung Jawab.....	viii
Daftar Lampiran	ix
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	
II. Neraca.....	
III. Laporan Operasional.....	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	7
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	11
2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	11
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	15
2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target.	26



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi	34
3.1 Basis Akuntansi.....	34
3.2 Dasar Pengukuran	35
3.3 Kebijakan Akuntansi.....	35
Bab IV Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi	60
4.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	60
4.1.1 Belanja.....	60
4.1.1.1 Belanja Operasi.....	61
4.1.1.1.1 Belanja Pegawai.....	62
4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa	62
4.1.1.2 Belanja Modal.....	64
4.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	64
4.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65
4.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca	66
4.2.1 Aset.....	66
4.2.1.1 Aset Lancar	67
4.2.1.1.1 Kas	67
4.2.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka	68
4.2.1.1.3 Persediaan	69
4.2.1.2 Aset Tetap.....	70
4.2.1.2.1 Tanah	71
4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin....	71
4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan	73
4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74
4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	75



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2020

	4.2.1.2.6	Aset Tetap Konstruksi	
		Dalam Pengerjaan	76
	4.2.1.2.7	Akumulasi Penyusutan	77
	4.2.1.3	Aset Lainnya.....	78
	4.2.1.3.1	Aset Tidak Berwujud..	79
	4.2.1.3.2	Aset Lain-lain	79
	4.2.1.3.3	Akumulasi Penyusutan	
		Aset Lainnya	80
	4.2.2	Kewajiban.....	80
	4.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	80
	4.2.2.1.1	Utang Beban	81
	4.2.2.1.2	Utang Jangka Pendek	
		Lainnya	82
	4.2.3	Ekuitas	82
4.3		Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	82
	4.3.1	Beban.....	83
	4.3.1.1	Beban Operasi	83
	4.3.1.1.1	Beban Pegawai - LO...	84
	4.3.1.1.2	Beban Persediaan.....	84
	4.3.1.1.3	Beban Jasa.....	87
	4.3.1.1.4	Beban Barang.....	88
	4.3.1.1.5	Beban Pemeliharaan ...	89
	4.3.1.1.6	Beban Perjalanan Dinas	89
	4.3.1.1.7	Beban Penyusutan.....	90
	4.3.1.1.8	Beban Amortisasi.....	90
	4.3.2	Surplus/ Defisit – LO	91
4.4		Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	91
	4.4.1	Ekuitas Awal	91
	4.4.2	Surplus/ Defisit-LO.....	91
	4.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	92



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

4.4.4	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	93
4.4.5	Ekuitas Akhir.....	93
Bab V	Penutup	94
VI.	Lampiran.....	



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi	12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	14
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Eselon	14
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.5 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019.....	18
Tabel 2.6 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020 .	19
Tabel 2.7 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.....	26
Tabel 4.1 Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019	61
Tabel 4.2 Belanja Operasi	61
Tabel 4.3 Belanja Pegawai Per Rekening	62
Tabel 4.4 Belanja Barang dan Jasa Per Rekening	63
Tabel 4.5 Belanja Modal	64
Tabel 4.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Rekening.....	65
Tabel 4.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Rekening.....	65
Tabel 4.8 Posisi Keuangan per 31 Desember 2020 dan 2019.....	66
Tabel 4.9 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2020 dan 2019	67
Tabel 4.10 Persediaan.....	69
Tabel 4.11 Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019	70
Tabel 4.12 Tanah per 31 Desember 2020.....	71
Tabel 4.13 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020.....	72
Tabel 4.14 Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020.....	72
Tabel 4.15 Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020.....	73
Tabel 4.16 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020.....	74



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.17 Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020.....	74
Tabel 4.18 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	75
Tabel 4.19 Rekapitulasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020.....	76
Tabel 4.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020.....	76
Tabel 4.21 Akumulasi Penyusutan.....	77
Tabel 4.22 Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019..	78
Tabel 4.23 Aset Lainnya Per 31 Desember 2020	78
Tabel 4.24 Kewajiban Jangka Pendek	81
Tabel 4.25 Utang Beban.....	82
Tabel 4.26 Beban-LO	83
Tabel 4.27 Beban Operasi	83
Tabel 4.28 Beban Pegawai-LO	84
Tabel 4.29 Beban Persediaan Per Jenis Barang	85
Tabel 4.30 Rincian Perhitungan Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020	85
Tabel 4.31 Beban Jasa per Obyek	87
Tabel 4.32 Beban Barang Per Obyek	88
Tabel 4.33 Beban Pemeliharaan Per Obyek.....	89
Tabel 4.34 Beban Perjalanan Dinas Per Rincian Obyek.....	90
Tabel 4.35 Beban Penyusutan per Obyek	90
Tabel 4.36 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	92
Tabel 4.37 Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar.....	93



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Sekretaris Daerah Kota Bekasi
Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2020

Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan perundang-undangan tentang keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH



Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.

NIP. 19650205 199011 2 002



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Per 31 Desember 2020
2. Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Bendahara Pengeluaran
3. STS Pengembalian/Pengurangan Belanja
4. FC Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
5. Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2020
6. Data Belanja Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020
7. Data Beban Dibayar Dimuka
8. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya
9. Rekapitulasi Barang ke Neraca
10. Pemutakhiran Data atas Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2020
11. Laporan Rekapitulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
12. Prosedur Analitis/Analisis Vertikal dan Horizontal



PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	114.010.397.330,00	100.918.515.310,00	88,52	89.575.007.744,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	105.907.115.664,00	93.009.557.310,00	87,82	88.722.681.744,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	51.868.116.700,00	46.263.898.544,00	89,20	42.624.016.642,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.038.998.964,00	46.745.658.766,00	86,50	46.098.665.102,00
5 . 2	BELANJA MODAL	8.103.281.666,00	7.908.958.000,00	97,60	852.326.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.061.281.666,00	7.908.958.000,00	98,11	852.326.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.010.397.330,00)	(100.918.515.310,00)	88,52	(89.575.007.744,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(114.010.397.330,00)	(100.918.515.310,00)	88,52	(89.575.007.744,00)

Bekasi, 30 Desember 2020
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
 N.P. 19650205 199011 2 002



PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01		Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.03		SEKRETARIAT DAERAH				
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.03 . 01		SEKRETARIAT DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	114.010.397.330,00	0,00	100.918.515.310,00	100.918.515.310,00	(13.091.882.020,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	105.907.115.664,00	0,00	93.009.557.310,00	93.009.557.310,00	(12.897.558.354,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	51.868.116.700,00	0,00	46.263.898.544,00	46.263.898.544,00	(5.604.218.156,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.009.839.300,00	0,00	13.694.891.577,00	13.694.891.577,00	(314.947.723,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	10.833.204.400,00	0,00	10.751.441.281,00	10.751.441.281,00	(81.763.119,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	1.170.261.900,00	0,00	1.137.184.020,00	1.137.184.020,00	(33.077.880,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	774.054.800,00	0,00	714.275.000,00	714.275.000,00	(59.779.800,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	83.169.500,00	0,00	58.823.000,00	58.823.000,00	(24.346.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	435.401.100,00	0,00	410.490.000,00	410.490.000,00	(24.911.100,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	680.695.100,00	0,00	596.523.540,00	596.523.540,00	(84.171.560,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.876.100,00	0,00	26.001.131,00	26.001.131,00	(6.874.969,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	176.400,00	0,00	153.605,00	153.605,00	(22.795,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	33.976.742.400,00	0,00	28.944.266.967,00	28.944.266.967,00	(5.032.475.433,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	33.976.742.400,00	0,00	28.944.266.967,00	28.944.266.967,00	(5.032.475.433,00)
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	25.635.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.635.000,00)
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	18.635.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.635.000,00)
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 10	Honorarium PNS	96.900.000,00	0,00	80.300.000,00	80.300.000,00	(16.600.000,00)
5 . 1 . 1 . 10 . 01	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan PNS	61.800.000,00	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	(3.300.000,00)
5 . 1 . 1 . 10 . 06	Uang Saku Kegiatan/Rapat PNS	35.100.000,00	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00	(13.300.000,00)
5 . 1 . 1 . 11	Honorarium Non PNS	3.759.000.000,00	0,00	3.544.440.000,00	3.544.440.000,00	(214.560.000,00)
5 . 1 . 1 . 11 . 02	Uang Saku Kegiatan/Rapat Non PNS	118.800.000,00	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00	(108.460.000,00)
5 . 1 . 1 . 11 . 03	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.640.200.000,00	0,00	3.534.100.000,00	3.534.100.000,00	(106.100.000,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.038.998.964,00	0,00	46.745.658.766,00	46.745.658.766,00	(7.293.340.198,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.950.344,00	0,00	673.328.800,00	673.328.800,00	(284.621.544,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.889.000,00	0,00	179.736.700,00	179.736.700,00	(152.300,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	20.400.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	(19.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	169.098.400,00	0,00	149.381.000,00	149.381.000,00	(19.717.400,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	546.000,00	546.000,00	(1.254.000,00)
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	84.035.000,00	0,00	0,00	0,00	(84.035.000,00)
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	272.710.000,00	0,00	122.709.000,00	122.709.000,00	(150.001.000,00)
5.1.2.01.14	Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer / Printer	202.515.944,00	0,00	193.251.100,00	193.251.100,00	(9.264.844,00)
5.1.2.01.16	Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga	27.502.000,00	0,00	27.005.000,00	27.005.000,00	(497.000,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	1.545.525.000,00	0,00	1.252.514.000,00	1.252.514.000,00	(293.011.000,00)
5.1.2.02.08	Belanja Bahan Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan	1.545.525.000,00	0,00	1.252.514.000,00	1.252.514.000,00	(293.011.000,00)
5.1.2.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.408.500,00	0,00	1.008.927.300,00	1.008.927.300,00	(413.481.200,00)
5.1.2.03.01	Belanja Cetak	1.247.490.500,00	0,00	899.969.000,00	899.969.000,00	(347.521.500,00)
5.1.2.03.02	Belanja Penggandaan dan / Penjilidan	174.918.000,00	0,00	108.958.300,00	108.958.300,00	(65.959.700,00)
5.1.2.04	Belanja Makanan dan Minuman	3.493.179.500,00	0,00	2.508.624.500,00	2.508.624.500,00	(984.555.000,00)
5.1.2.04.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	553.753.000,00	0,00	526.514.000,00	526.514.000,00	(27.239.000,00)
5.1.2.04.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.047.500,00	0,00	20.163.500,00	20.163.500,00	(19.884.000,00)
5.1.2.04.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.864.429.000,00	0,00	1.951.447.000,00	1.951.447.000,00	(912.982.000,00)
5.1.2.04.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Seminar/Kegiatan Lainnya	34.950.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	(24.450.000,00)
5.1.2.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	191.240.000,00	0,00	168.600.000,00	168.600.000,00	(22.640.000,00)
5.1.2.05.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	57.140.000,00	0,00	56.055.000,00	56.055.000,00	(1.085.000,00)
5.1.2.05.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	112.850.000,00	0,00	112.545.000,00	112.545.000,00	(305.000,00)
5.1.2.05.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.05.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(21.250.000,00)
5.1.2.05.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	274.837.000,00	0,00	270.580.000,00	270.580.000,00	(4.257.000,00)
5.1.2.07.02	Belanja Pakaian adat daerah	124.840.000,00	0,00	122.600.000,00	122.600.000,00	(2.240.000,00)
5.1.2.07.04	Belanja Pakaian Olahraga	149.997.000,00	0,00	147.980.000,00	147.980.000,00	(2.017.000,00)
5.1.2.08	Belanja Barang Inventaris Non Aset	366.942.000,00	0,00	330.896.500,00	330.896.500,00	(36.045.500,00)
5.1.2.08.01	Belanja Barang Inventaris Peralatan / Perlengkapan Kantor	178.128.000,00	0,00	177.168.000,00	177.168.000,00	(960.000,00)
5.1.2.08.03	Belanja Barang Inventaris Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	18.498.000,00	0,00	17.785.000,00	17.785.000,00	(713.000,00)
5.1.2.08.04	Belanja Barang Inventaris Peralatan / Perlengkapan Kebersihan	26.066.000,00	0,00	0,00	0,00	(26.066.000,00)
5.1.2.08.13	Belanja Barang Inventaris Sarana Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.08.14	Belanja Barang Inventaris Buku dan Barang Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.08.16	Belanja Bendera / Umbul-Umbul / Rumbai	144.250.000,00	0,00	135.943.500,00	135.943.500,00	(8.306.500,00)
5.1.2.11	Belanja Hadiah	31.200.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	(23.400.000,00)
5.1.2.11.01	Belanja Hadiah Barang	31.200.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	(23.400.000,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.430.505.000,00	0,00	697.654.692,00	697.654.692,00	(732.850.308,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	293.400.000,00	0,00	176.700.000,00	176.700.000,00	(116.700.000,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.137.105.000,00	0,00	520.954.692,00	520.954.692,00	(616.150.308,00)
5.1.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.16	Belanja Jasa Kantor	5.967.497.000,00	0,00	5.477.604.806,00	5.477.604.806,00	(489.892.194,00)
5.1.2.16.01	Belanja Telepon	34.488.000,00	0,00	7.652.868,00	7.652.868,00	(26.835.132,00)
5.1.2.16.02	Belanja Air	216.009.000,00	0,00	119.597.200,00	119.597.200,00	(96.411.800,00)
5.1.2.16.03	Belanja Listrik	5.426.400.000,00	0,00	5.079.158.023,00	5.079.158.023,00	(347.241.977,00)
5.1.2.16.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.000.000,00	0,00	38.208.000,00	38.208.000,00	(1.792.000,00)
5.1.2.16.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	139.300.000,00	0,00	127.988.715,00	127.988.715,00	(11.311.285,00)
5.1.2.16.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.16.08	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.16.10	Belanja Iuran Wajib Forum Pengelola Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.2.16.13	Belanja Retribusi	51.300.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	(6.300.000,00)
5.1.2.18	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	799.300.000,00	0,00	695.537.300,00	695.537.300,00	(103.762.700,00)
5.1.2.18.01	Belanja Jasa Service Kendaraan	171.900.000,00	0,00	140.320.000,00	140.320.000,00	(31.580.000,00)
5.1.2.18.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	490.000.000,00	0,00	489.900.500,00	489.900.500,00	(99.500,00)
5.1.2.18.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	137.400.000,00	0,00	65.316.800,00	65.316.800,00	(72.083.200,00)
5.1.2.19	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.074.276.000,00	0,00	620.705.200,00	620.705.200,00	(453.570.800,00)
5.1.2.19.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(350.000.000,00)
5.1.2.19.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	431.630.000,00	0,00	380.980.000,00	380.980.000,00	(50.650.000,00)
5.1.2.19.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	51.636.000,00	0,00	45.240.000,00	45.240.000,00	(6.396.000,00)
5.1.2.19.05	Belanja Sewa Gudang / Lahan	206.010.000,00	0,00	194.485.200,00	194.485.200,00	(11.524.800,00)
5.1.2.19.06	Belanja Sewa Penginapan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)
5.1.2.20	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	364.400.000,00	0,00	150.702.000,00	150.702.000,00	(213.698.000,00)
5.1.2.20.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	364.400.000,00	0,00	150.702.000,00	150.702.000,00	(213.698.000,00)
5.1.2.22	Belanja Sewa Sarana, Perlengkapan dan Peralatan	599.100.000,00	0,00	262.816.000,00	262.816.000,00	(336.284.000,00)
5.1.2.22.01	Belanja Sewa Meubelair	90.250.000,00	0,00	35.226.000,00	35.226.000,00	(55.024.000,00)
5.1.2.22.02	Belanja Sewa Perlengkapan Komputer (Hardware) / Peralatan dan Perlengkapan Jaringan	48.000.000,00	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	(7.800.000,00)
5.1.2.22.04	Belanja Sewa Generator / Genset	9.000.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	(5.210.000,00)
5.1.2.22.05	Belanja Sewa Tenda / Panggung	262.500.000,00	0,00	71.575.000,00	71.575.000,00	(190.925.000,00)
5.1.2.22.07	Belanja Sewa Sound Sistem	63.750.000,00	0,00	50.625.000,00	50.625.000,00	(13.125.000,00)
5.1.2.22.08	Belanja Sewa Mesin Fotocopy	33.600.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	(6.600.000,00)
5.1.2.22.10	Belanja Sewa Pendingin Ruangan / AC	24.250.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	(14.450.000,00)
5.1.2.22.13	Belanja Sewa Penghias / Pengharum Gedung Kantor	18.750.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(6.750.000,00)
5.1.2.22.17	Belanja Sewa Karpet	49.000.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	(36.400.000,00)
5.1.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
5.1.2.25.03	Belanja Bimbingan Teknis	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 28	Belanja Jasa Konsultansi	257.515.000,00	0,00	205.757.500,00	205.757.500,00	(51.757.500,00)
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	157.515.000,00	0,00	156.395.000,00	156.395.000,00	(1.120.000,00)
5 . 1 . 2 . 28 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	0,00	49.362.500,00	49.362.500,00	(50.637.500,00)
5 . 1 . 2 . 28 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Jasa Lainnya	178.020.000,00	0,00	152.144.000,00	152.144.000,00	(25.876.000,00)
5 . 1 . 2 . 29 . 02	Belanja Jasa Penyelenggaraan acara (Event Organizer) / Jasa Seni dan Budaya	178.020.000,00	0,00	152.144.000,00	152.144.000,00	(25.876.000,00)
5 . 1 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	15.268.419.000,00	0,00	14.791.409.636,00	14.791.409.636,00	(477.009.364,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 01	Belanja Jasa Upah Tenaga Kontrak Kerja	12.500.525.000,00	0,00	12.429.952.136,00	12.429.952.136,00	(70.572.864,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 02	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	70.410.000,00	0,00	38.675.000,00	38.675.000,00	(31.735.000,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 04	Belanja Upah Harian / Borongan	137.124.000,00	0,00	125.990.000,00	125.990.000,00	(11.134.000,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 07	Belanja Jasa Administrasi	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(26.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 08	Belanja Jasa Pembuatan Media Informasi / Publikasi	2.484.360.000,00	0,00	2.173.542.500,00	2.173.542.500,00	(310.817.500,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 12	Belanja Jasa Pencucian Pakaian / Alat Kesenian / Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	(26.750.000,00)
5 . 1 . 2 . 35	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 35 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 37	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	542.500.000,00	0,00	122.500.000,00	122.500.000,00	(420.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 37 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	542.500.000,00	0,00	122.500.000,00	122.500.000,00	(420.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 39	Belanja Pemeliharaan	18.736.487.300,00	0,00	17.047.206.532,00	17.047.206.532,00	(1.689.280.768,00)
5 . 1 . 2 . 39 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.484.865.277,00	0,00	15.681.374.743,00	15.681.374.743,00	(803.490.534,00)
5 . 1 . 2 . 39 . 11	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor/ Komputer / Peralatan dan Perlengkapan Te	1.162.103.300,00	0,00	866.972.110,00	866.972.110,00	(295.131.190,00)
5 . 1 . 2 . 39 . 12	Belanja Pemeliharaan Meubelair / Peralatan Dapur / Penghias Ruang Rumah Tangga	100.000.000,00	0,00	44.891.550,00	44.891.550,00	(55.108.450,00)
5 . 1 . 2 . 39 . 13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio / Alat-alat Komunikasi	120.000.000,00	0,00	118.151.000,00	118.151.000,00	(1.849.000,00)
5 . 1 . 2 . 39 . 16	Belanja Pemeliharaan Saluran Jalan / Jaringan Air	400.000.000,00	0,00	137.318.502,00	137.318.502,00	(262.681.498,00)
5 . 1 . 2 . 39 . 18	Belanja Pemeliharaan Insfrastruktur Umum / Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	469.518.723,00	0,00	198.498.627,00	198.498.627,00	(271.020.096,00)
5 . 1 . 2 . 40	Belanja Honorarium PNS	137.800.000,00	0,00	48.100.000,00	48.100.000,00	(89.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 40 . 08	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Juri / Moderator PNS	137.800.000,00	0,00	48.100.000,00	48.100.000,00	(89.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 41	Belanja Honorarium Non PNS	220.700.000,00	0,00	138.250.000,00	138.250.000,00	(82.450.000,00)
5 . 1 . 2 . 41 . 07	Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Juri / Moderator Non PNS	220.700.000,00	0,00	138.250.000,00	138.250.000,00	(82.450.000,00)
5 . 1 . 2 . 44	Belanja Efisiensi	65.197.320,00	0,00	0,00	0,00	(65.197.320,00)
5 . 1 . 2 . 44 . 01	Belanja Efisiensi	65.197.320,00	0,00	0,00	0,00	(65.197.320,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2	BELANJA MODAL	8.103.281.666,00	0,00	7.908.958.000,00	7.908.958.000,00	(194.323.666,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.061.281.666,00	0,00	7.908.958.000,00	7.908.958.000,00	(152.323.666,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.200.000.000,00	0,00	4.191.000.000,00	4.191.000.000,00	(9.000.000,00)
5.2.2.04.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.216.000.000,00	0,00	3.207.000.000,00	3.207.000.000,00	(9.000.000,00)
5.2.2.04.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	984.000.000,00	0,00	984.000.000,00	984.000.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	537.276.300,00	0,00	536.076.300,00	536.076.300,00	(1.200.000,00)
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	513.276.300,00	0,00	513.276.300,00	513.276.300,00	0,00
5.2.2.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	24.000.000,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	(1.200.000,00)
5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.942.217.666,00	0,00	2.800.094.000,00	2.800.094.000,00	(142.123.666,00)
5.2.2.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	113.002.000,00	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	(66.802.000,00)
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.956.488.456,00	0,00	1.908.462.400,00	1.908.462.400,00	(48.026.056,00)
5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	872.727.210,00	0,00	845.431.600,00	845.431.600,00	(27.295.610,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	272.778.300,00	0,00	272.778.300,00	272.778.300,00	0,00
5.2.2.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	192.603.000,00	0,00	192.603.000,00	192.603.000,00	0,00
5.2.2.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	80.175.300,00	0,00	80.175.300,00	80.175.300,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	109.009.400,00	0,00	109.009.400,00	109.009.400,00	0,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	109.009.400,00	0,00	109.009.400,00	109.009.400,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(42.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(42.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(42.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(114.010.397.330,00)	0,00	(100.918.515.310,00)	(100.918.515.310,00)	13.091.882.020,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(114.010.397.330,00)	0,00	(100.918.515.310,00)	(100.918.515.310,00)	13.091.882.020,00



NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan	
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03	SEKRETARIAT DAERAH	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas)	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	391.237.666,67	229.166.666,67
Persediaan	421.991.900,00	403.166.050,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -TGR	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	813.229.566,67	632.332.716,67
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	7.536.333.930,00	7.536.333.930,00
Peralatan dan Mesin	38.891.966.464,74	37.397.519.843,74
Gedung dan Bangunan	158.374.978.238,00	158.086.874.262,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.437.666.957,00	4.437.666.957,00
Aset Tetap Lainnya	320.752.500,00	320.752.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(57.637.227.800,74)	(64.330.733.468,54)
JUMLAH ASET TETAP	151.924.470.289,00	143.448.414.024,20
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	6,00	6,00
Aset Lain-lain	1.352.084.471,16	1.077.084.471,16
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.088.420.205,00)	(813.420.205,00)
Penyisihan Tuntutan Ganti rugi -TGR	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	263.664.272,16	263.664.272,16
JUMLAH ASET	153.001.364.127,83	144.344.411.013,03
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03	SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01	SEKRETARIAT DAERAH

URAIAN	2020	2019
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	420.528.597,00	1.485.977.357,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.528.597,00	1.485.977.357,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	420.528.597,00	1.485.977.357,00
EKUITAS		
EKUITAS	152.580.835.530,83	142.858.433.656,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	153.001.364.127,83	144.344.411.013,03

Bekasi, 30 Desember 2020
PENGUNA ANGGARAN



Dr. RENY NENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan : 4 . 01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03	SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01	SEKRETARIAT DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	96.920.676.168,20	95.018.055.854,66	1.902.620.313,54	2,00
9 . 1	BEBAN OPERASI	96.920.676.168,20	95.018.055.854,66	1.902.620.313,54	2,00
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	57.717.224.094,00	42.543.905.155,00	15.173.318.939,00	35,67
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	1.453.218.300,00	1.313.163.350,00	140.054.950,00	10,67
9 . 1 . 3	Beban Jasa	9.552.105.632,00	21.728.498.748,66	(12.176.393.116,66)	(56,04)

Urusan Pemerintahan : 4 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 4	Beban Barang	5.346.969.800,00	3.977.071.135,00	1.369.898.665,00	34,44
9 . 1 . 5	Beban Pemeliharaan	16.771.142.532,00	17.527.585.609,00	(756.443.077,00)	(4,32)
9 . 1 . 6	Beban Perjalanan Dinas	697.654.692,00	465.053.381,00	232.601.311,00	50,02
9 . 1 . 7	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 8	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 10	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 11	Beban Penyusutan	5.382.361.118,20	7.462.778.476,00	(2.080.417.357,80)	(27,88)
9 . 1 . 12	Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 13	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 14	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(96.920.676.168,20)	(95.018.055.854,66)	(1.902.620.313,54)	2,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(193.841.352.336,40)	(190.036.111.709,32)	(3.805.240.627,08)	2,00

Urusan Pemerintahan : 4 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	---------------	---------------	--------------------------	-----

Bekasi, 30 Desember 2020
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
 NIP. 19650205 199011 2 002



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2020	2019
EKUITAS AWAL	5.6.1	142,858,433,656.03	149,504,585,020.69
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(96,920,676,168.20)	(95,018,055,854.66)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3	5,724,562,733.00	(1,203,103,254.00)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI		-	-
KOREKSI EKUITAS LAINNYA		5,724,562,733.00	(1,203,103,254.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		100,918,515,310.00	89,575,007,744.00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	152,580,835,530.83	142,858,433,656.03

Bekasi, 30 Desember 2020
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan *good governance* adalah dengan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada OPD.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu OPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan ;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Tahun 2020 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan atas Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 nomor 143



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 56 Seri A);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- 2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2020

- Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 3.1 Basis Akuntansi
 - 3.2 Dasar Pengukuran
 - 3.3 Kebijakan Akuntansi

- Bab IV Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 - 4.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1 Belanja
 - 4.1.1.1 Belanja Operasi
 - 4.1.1.1.1 Belanja Pegawai
 - 4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa
 - 4.1.1.2 Belanja Modal
 - 4.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 4.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 4.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - 4.2.1 Aset
 - 4.2.1.1 Aset Lancar
 - 4.2.1.1.1 Kas
 - 4.2.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka
 - 4.2.1.1.3 Persediaan
 - 4.2.1.2 Aset Tetap
 - 4.2.1.2.1 Tanah
 - 4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin
 - 4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan
 - 4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- 4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan
 - 4.2.1.3 Aset Lainnya
 - 4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud
 - 4.2.1.3.2 Aset Lain-lain
 - 4.2.1.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 4.2.2 Kewajiban
 - 4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 4.2.2.1.1 Utang Beban
 - 4.2.2.1.2 Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 4.2.3 Ekuitas
 - 4.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.3.1 Beban
 - 4.3.1.1 Beban Operasi
 - 4.3.1.1.1 Beban Pegawai - LO
 - 4.3.1.1.2 Beban Persediaan
 - 4.3.1.1.3 Beban Jasa
 - 4.3.1.1.4 Beban Barang
 - 4.3.1.1.5 Beban Pemeliharaan
 - 4.3.1.1.6 Beban Perjalanan Dinas
 - 4.3.1.1.7 Beban Penyusutan
 - 4.3.1.1.8 Beban Amortisasi
 - 4.3.2 Surplus/ Defisit - LO
 - 4.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.1 Ekuitas Awal
 - 4.4.2 Surplus/ Defisit-LO
-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar

4.4.4 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

4.4.5 Ekuitas Akhir

Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri D) Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas :



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.1
DAFTAR JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

URAIAN JABATAN		PEMANGKU JABATAN
Sekretaris Daerah	:	Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan		Drs. HANAN TARYA, M.Si
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	:	Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	:	Dra. Hj. DWIE ANDYARINI DIAN ARGHA, M.Si.
Asisten Pemerintahan (Asisten I)	:	YUDIANTO AKS., M.Si
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II)	:	Drs. SUDARSONO, M.Si
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian (Asisten III)	:	Drs. NADIH ARIFIN, M.Si.
Asisten Pemerintahan (Asisten I)		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		FERDINAN, S.STP, M.Si
Kasubbag Bina Otonomi Daerah	:	MOHAMMAD HARRI HENDARMAN, S.IP, M.Si
Kasubbag Pemerintahan Umum	:	TJAHJANING DYAH NUGRAHANI, S.H., M.Si
Kasubag Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan	:	TOPIK AJI MULYA, S.Sos.
Kepala Bagian Hukum	:	DYAH KUSUMO WINAHYU, S.H., M.H.
Kasubbag Bantuan Hukum	:	ROOSNDAJANI RETNO DEWATI, S.H. M.H.
Kasubbag Perundang-undangan	:	ABDUL HAKIM AMIR, S.H
Kasubbag Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (SJDI)	:	GOMOS JAKSANA PUTRA SIMANDJUNTAK, S.H.
Kepala Bagian Organisasi	:	ALI SOFYAN, S.STP, M.Si
Kasubbag Tata Laksana	:	NUR LAELA PUSPITA SARI, S.STP, M.Si.
Kasubbag Kelembagaan	:	SAEPUL ANWAR, S.E, M.M
Kasubbag Pengembangan Fungsi Aparatur	:	DIAN HARIANI, S.Sos., M.Si.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Kepala Bagian Perlengkapan	:	Drs. DEDED KUSMAYADI
Kasubbag Analisa Kebutuhan	:	NANDRA SAROMA, S.AP, M.Si.
Kasubbag Pengadaan dan Distribusi	:	SELAMET HARYONO, AKS
Kasubbag Pengendalian	:	HALIDA LUTFIA, S.E, M.M.
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II)		
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	:	MUHAMMAD SOLIKHIN, S.Si.T, M.M.
Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	:	IIM HALIMI, S.T.
Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	:	CHONDRO WIBHOWO MAHARTOYO SUKMO, S.E.
Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	:	ALI SUPODO, S.H.
Kepala Bagian Pembangunan	:	ARIF SUPRIYANTO, S.E. M.M.
Kasubbag Penyusunan Program Pembangunan	:	Ir. EMY SUYANTININGTYAS, M.Si
Kasubbag Pengendalian Pembangunan	:	ABDUL HAMID A, S.Sos, M.Si
Kasubbag Evaluasi Pelaporan Pembangunan	:	ERLLY KURNIATI, S.E, M.E.
Kepala Bagian Kesos	:	MAKA NACHROWI, S.AP., M.Si.
Kasubbag Bina Sosial	:	YEYEN KUSMIATI, S.Sos, M.Si
Kasubbag Bina Keagamaan	:	RIDAN, S.Ag
Kasubbag Bina Pendidikan	:	NASRO DWIPRANA, S.Ag, M.M
Kepala Bagian Kerjasama	:	Drs. PENIEL NEFINDO IMANUEL MAMBO, M.Si
Kasubbag Pengembangan Kerjasama	:	DIANA, S.H., M.Si.
Kasubbag Tata Kelola Kerjasama	:	DEWI SUSANTI, S.E.
Kasubbag Pengendalian Kerjasama	:	RISMANNAFAR TRI DARAJAT, S.IP., M.Si
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian (Asisten III)		
Kepala Bagian Umum	:	Hj. YENI, S.H., M.Si.
Kasubbag Rumah Tangga	:	Dra. SUSANTI, M.M.
Kasubbag Pemeliharaan	:	DERRY RISMAWAN, S.Sos., M.Si
Kasubbag Keuangan	:	ESTUNINGSIH ANGGRAENI, S.E., M.A.
Kepala Bagian Tata Usaha	:	FITRI WIDYATI, S.STP, M.Si
Kasubbag Adminstrasi dan Kepegawaian	:	HAIRONI, S.E., M.Si.
Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas	:	AKBAR JULIANDO, S.STP, M.M.
Kasubbag Perencanaan Setda	:	DEWI WAHYU WIDOWATI, S.E.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	:	SAJEKTI RUBIYAH, S.E.
Kasubbag Publikasi Eksternal	:	MUHAMMAD MUCHLIS, S.E, M.Si
Kasubbag Hubungan Dokumentasi Internal	:	DIAH SETIYAWATI, S.Sos., M.A.
Kasubbag Fasilitasi Hubungan Media dan Kunjungan Daerah	:	HERMAN SUNARYA, S.E.
Kepala Bagian Perekonomian	:	EKA HIDAYAT TAUFIK, S.IP.,M.T
Kasubbag Bina Perekonomian	:	SIGIT RUSMARYANTO, S.Sos.
Kasubbag Bina Produksi	:	MARIA CELESTE ABEL LEMOS, S.Sos., M.Si
Kasubbag Bina BUMD	:	FAJAR TRIAWAN, S.E., M.Si.

Kondisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 401 pegawai yang terdiri dari 221 PNS dan 180 TKK, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	31 pegawai	
Golongan III	160 pegawai	
Golongan II	28 pegawai	
Golongan I	2 pegawai	
TKK	180 pegawai	
Jumlah	401 pegawai	

Sumber Data : Tata Usaha (Kepegawaian) Setda Kota Bekasi

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II	7 pegawai	
Eselon III.a	14 pegawai	
Eselon III.b	-	
Eselon IV.a	36 pegawai	
Fungsional Umum	157 pegawai	
Fungsional Tertentu	7 pegawai	
TKK	180 pegawai	
Jumlah	401 pegawai	

Sumber Data : Tata Usaha (Kepegawaian) Setda Kota Bekasi



Tabel 2.4

JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S2	56	52	4
S1	205	121	84
D4	1	-	-
D 3	41	18	23
SLTA	79	29	50
SLTP	13		13
SD	6	1	5
Jumlah	401	221	180

Sumber Data : Tata Usaha (Kepegawaian) Setda Kota Bekasi

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berdampak pada banyak aspek yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan sosial distancing dan anjuran work from home yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini mengakibatkan beberapa sektor antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik dan sektor-sektor lainnya mengurangi bahkan menghentikan aktivitasnya sementara waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki pengaruh yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro.

Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh Pemerintah baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 ini. Langkah utama yang sudah dilakukan Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

(Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini secara garis besar membahas dua hal yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Dengan adanya Peningkatan Pandemi Covid-19 diprediksi akan berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum Covid-19 sudah cukup tinggi dengan real GDP Growth sebesar 5,1. Penurunan pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Secara mikro sepertinya dampak pandemi Covid-19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi baik berskala besar maupun kecil. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor Pemerintahan. Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktifitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah khususnya pada bidang kesehatan dan sosial.

Pemerintah selanjutnya juga melakukan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dibidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah semua melakukan revisi APBN/APBD Tahun anggaran 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Oleh karena itu pada Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 ini juga mengalami dampak kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan mengadakan *refocusing* dan realokasi belanja non prioritas.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya. Dalam mendukung menyelenggarakan fungsi tersebut, dijabarkan dalam 7 (tujuh) Program yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif;
6. Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD;
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah;

Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang pada awal tahun anggaran 2020 pada pagu murni anggaran kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp139.282.323.100,00 setelah terjadi *refocusing* anggaran pada tahapan parsial 3 Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp114.010.397.330,00 sekitar 18,14% (delapan belas koma empat belas persen). Pada saat setelah terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp114.010.397.330,00 juga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, terbukti pada realisasi anggaran sebesar 88,52% (delapan puluh delapan koma lima puluh dua persen). Hal tersebut juga merupakan dampak dari adanya pembatasan kegiatan akibat Pandemi Covid-19 dan efisiensi anggaran.

Adapun alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi setelah perubahan sebesar Rp114.010.397.330,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp47.986.581.700,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp66.023.815.630,00 dan Realisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

tahun 2020 adalah sebesar Rp100.918.515.310,00 tercapai sebesar 88,52%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp42.639.158.544,00 tercapai sebesar 88,86%, Belanja Langsung Urusan Rp17.726.733.941,00 tercapai sebesar 82,66% dan Belanja Langsung Penunjang Urusan Rp40.552.622.825,00 tercapai 90,97%.

Gambaran rincian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2019

Kode Rekening	Uraian	2020			2019		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.986.581.700,00	42.639.158.544,00	88,86	53.736.766.000,00	39.659.607.642,00	73,80
5.1.1	Belanja Pegawai	47.986.581.700,00	42.639.158.544,00	88,86	53.736.766.000,00	39.659.607.642,00	73,80
5.2	BELANJA LANGSUNG	66.023.815.630,00	58.279.356.766,00	88,27	67.908.164.696,00	49.915.400.102,00	73,50
5.2.1	Belanja Pegawai	3.881.535.000,00	3.624.740.000,00	93,38	3.681.851.000,00	2.964.409.000,00	80,51
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.038.998.964,00	46.745.658.766,00	86,50	63.040.267.196,00	46.098.665.102,00	73,13
5.2.3	Belanja Modal	8.103.281.666,00	7.908.958.000,00	97,60	1.186.046.500,00	852.326.000,00	71,86
Surplus/ (Defisit) LRA		(114.010.397.330,00)	(100.918.515.310,00)	88,52	(121.644.930.696,00)	(89.575.007.744,00)	73,64
SILPA		(114.010.397.330,00)	(100.918.515.310,00)	88,52	(121.644.930.696,00)	(89.575.007.744,00)	73,64



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.6
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE REKENING	UNIT KERJA, PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5.1	Belanja Tidak Langsung	47.986.581.700,00	42.639.158.544,00	88,86
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	14.009.839.300,00	13.694.891.577,00	97,75
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.833.204.400,00	10.751.441.281,00	99,25
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.170.261.900,00	1.137.184.020,00	97,17
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	774.054.800,00	714.275.000,00	92,28
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	83.169.500,00	58.823.000,00	70,73
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	435.401.100,00	410.490.000,00	94,28
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	680.695.100,00	596.523.540,00	87,63
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.876.100,00	26.001.131,00	79,09
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	176.400,00	153.605,00	87,08
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	33.976.742.400,00	28.944.266.967,00	85,19
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	33.976.742.400,00	28.944.266.967,00	85,19



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

II. BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN

URAIAN	PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
			4	5
1	2	3	4	5
BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (RUTIN)				
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.550.300.020,00	5.111.310.392,00	92,09
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000,00	195.616.000,00	39,12
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	385.856.000,00	351.456.000,00	91,08
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	360.000.000,00	356.850.800,00	99,13
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330.000.000,00	309.558.000,00	93,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	149.381.000,00	99,59
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000,00	67.590.000,00	96,56
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	38.208.000,00	95,52
	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.225.000.000,00	2.143.972.000,00	96,36
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.000.000.000,00	479.161.965,00	47,92
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12.500.525.000,00	12.429.952.136,00	99,44
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	162.000.000,00	127.600.000,00	78,77
	Penataan Arsip	0,00	0,00	0,00
	Terselenggaranya Peningkatan Sarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Penyediaan Ruang Kerja		1.041.350.000,00	641.177.200,00	61,57



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
1	2	3	4	5
dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	230.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000.000,00	15.760.098.372,00	92,71
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.070.000.000,00	818.246.300,00	76,47
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.418.100.000,00	1.088.373.110,00	76,75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100.000.000,00	44.891.550,00	44,89
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170.000.000,00	168.600.000,00	99,18
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	125.000.000,00	122.600.000,00	98,08
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	150.000.000,00	147.980.000,00	98,65
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BL PENUNJANG URUSAN		44.578.131.020,00	40.552.622.825,00	90,97
BELANJA URUSAN				
Terselenggaranya Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administrasi			
	Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	20.000.000,00	7.950.000,00	39,75
	Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60.000.000,00	16.400.640,00	27,33
	Harmonisasi Rancangan	0,00	0,00	0,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
			4	5
1	2	3	4	5
	Peraturan Wali Kota			
	Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	0,00	0,00	0,00
	Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150.000.000,00	89.938.087,00	59,96
	Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2019 (PRODESKEL)	0,00	0,00	0,00
	Sinergitas Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019	19.200.000,00	19.011.000,00	99,02
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2019	87.030.000,00	78.129.000,00	89,77
	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019	0,00	0,00	0,00
	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00
	Monitoring dan Evaluasi K3	0,00	0,00	0,00
	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	0,00	0,00	0,00
	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Peta Proses Bisnis	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	54.526.000,00	54.526.000,00	100,00
	Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	150.000.000,00	51.080.000,00	34,05
	Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000,00	1.361.854.000,00	68,09
	Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0,00	0,00	0,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
			4	5
1	2	3	4	5
	Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Keprotokolan	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan KOMDA HIV / AIDS	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1.052.690.000,00	899.786.414,00	85,47
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	150.000.000,00	144.365.000,00	96,24
	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	377.350.000,00	58.290.000,00	15,45
	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	364.050.000,00	35.580.000,00	9,77
	Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	700.000.000,00	22.883.000,00	3,27
	Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	2.865.000.000,00	2.715.022.000,00	94,77
	Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2020	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	50.000.000,00	44.200.000,00	88,40
	Pengendalian Inflasi Daerah	73.040.000,00	71.900.000,00	98,44
	Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	50.000.000,00	0,00	0,00
	Penusunan Naskah Kerja Sama	0,00	0,00	0,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
			4	5
1	2	3	4	5
	Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan Kehumasan	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	210.400.000,00	58.040.000,00	27,59
	Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	371.500.000,00	324.922.000,00	87,46
	Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.000.000,00	135.000.000,00	61,64
	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.173.542.500,00	86,94
	Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	39.600.000,00	30.415.000,00	76,81
	Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	150.000.000,00	64.800.000,00	43,20
	Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	178.080.000,00	178.080.000,00	100,00
	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
	Surveillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 DAN Standarisasi ISO	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	0,00	0,00	0,00
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	243.180.000,00	131.500.000,00	54,08
	Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	240.000.000,00	219.494.000,00	91,46
	Pengendalian Pembangunan	82.927.000,00	81.747.000,00	98,58
	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	30.000.000,00	5.400.000,00	18,00
	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2019	21.194.000,00	20.862.800,00	98,44
	Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bekasi	250.000.000,00	117.279.000,00	46,91



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)	
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Penilaian RW Siaga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	273.600.000,00	173.400.000,00	63,38
Terselenggaranya Pembinaan dan Pemantauan BUMD	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD			
	Pengendalian dan Evaluasi BUMD	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Kajian BUMD Persampahan	0,00	0,00	0,00
Terselenggaranya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah			
	Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	114.360.000,00	101.466.000,00	88,73
	Pengadaan Sarana Mobilitas	4.200.000.000,00	4.191.000.000,00	99,79
	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	123.215.000,00	93.215.000,00	75,65
	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	2.543.556.210,00	2.530.125.400,00	99,47
	Pengadaan Meubelair	946.854.600,00	946.854.600,00	100,00
	Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	0,00	0,00	0,00
	Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Tiang Umbul-Umbul, Umbul-Umbul, Vitrase dan Tiang Bendera	138.000.000,00	135.943.500,00	98,51
Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	287.331.800,00	282.732.000,00	98,40	
JUMLAH BL URUSAN		21.445.684.610,00	17.726.733.941,00	82,66
JUMLAH BL PENUNJANG URUSAN DAN URUSAN		66.023.815.630,00	58.279.356.766,00	88,27

Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2020 telah tercapai sebesar Rp100.918.515.310,00 dengan persentase capaian sebesar 88,52% dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Asli



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Daerah (APBD) sebesar Rp114.010.397.330,00,- Penjelasan terkait capaian target anggaran adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp47.986.581.700,00 akan tetapi terealisasi sebesar Rp42.639.158.544,00 dengan persentase capaian sebesar 88,86%;
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Urusan ditargetkan sebesar Rp21.445.684.610,00 akan tetapi terealisasi sebesar Rp17.726.733.941,00 dengan persentase capaian sebesar 82,66%;
3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Penunjang Urusan ditargetkan sebesar Rp44.578.131.020,00 akan tetapi teralisasi sebesar Rp40.552.622.825,00 dengan persentase capaian sebesar 90,97%.

2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

Tabel 2.7
HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung	47.986.581.700,00	5.347.423.156,00	11,14	Penyerapan anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan
Belanja Langsung				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.550.300.020,00	438.989.628,00	7,91	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000,00	304.384.000,00	60,88	Disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	385.856.000,00	34.400.000,00	8,92	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	360.000.000,00	3.149.200,00	0,87	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330.000.000,00	20.442.000,00	6,19	-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	619.000,00	0,41	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000,00	2.410.000,00	3,44	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	1.792.000,00	4,48	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	2.225.000.000,00	81.028.000,00	3,64	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.000.000.000,00	520.838.035,00	52,08	Adanya kebijakan pembatasan berkumpul karna Pandemi Covid-19 sehingga rapat koordinasi diarahkan ke video conference atau memanfaatkan aplikasi social messenger
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12.500.525.000,00	70.572.864,00	0,56	-
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	162.000.000,00	34.400.000,00	21,23	Disesuaikan dengan kebutuhan
Penataan Arsip	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Penyediaan Ruang Kerja	1.041.350.000,00	400.172.800,00	38,43	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	Tidak ada rumah dinas yang di pelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000.000,00	1.239.901.628,00	7,29	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.070.000.000,00	251.753.700,00	23,53	Penyerapan anggaran di sesuaikan dengan prioritas kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.418.100.000,00	329.726.890,00	23,25	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	100.000.000,00	55.108.450,00	55,11	Disesuaikan dengan kebutuhan



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170.000.000,00	1.400.000,00	0,82	-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	125.000.000,00	2.400.000,00	1,92	-
Pengadaan Pakaian Olah Raga	150.000.000,00	2.020.000,00	1,35	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanana Administratif				
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	20.000.000,00	12.050.000,00	60,25	Efisiensi dikarenakan Pandemi Covid
Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60.000.000,00	43.599.360,00	72,67	Adanya kebijakan pembatasan Bepergian/Dinas Luar Daerah karna pandemi Covid
Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	150.000.000,00	60.061.913,00	40,04	Adanya kebijakan pembatasan Bepergian/Dinas Luar Daerah karna pandemi Covid
Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2019 (PRODESKEKEL)	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Sinergitas Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019	19.200.000,00	189.000,00	0,98	-
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2019	87.030.000,00	8.901.000,00	10,23	-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan BBGRM Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Monitoring dan Evaluasi K3	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyusunan Peta Proses Bisnis	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan	54.526.000,00	0,00	0,00	-
Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	150.000.000,00	98.920.000,00	65,95	Adanya kebijakan pembatasan berkumpul karna pandemi Covid sehingga rapat koordinasi diarahkan ke video conference atau memanfaatkan aplikasi social messenger
Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000,00	638.146.000,00	31,91	Frekuensi Dialog/Audiensi dikurangi karena pandemi Covid
Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan Keprotokolan	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan KOMDA HIV / AIDS	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi	1.052.690.000,00	152.903.586,00	14,53	-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi	150.000.000,00	5.635.000,00	3,76	-
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	377.350.000,00	319.060.000,00	84,55	Karena Dampak Pandemi covid -19, kegiatan tetap dilaksanakan melalui virtual
Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	364.050.000,00	328.470.000,00	90,23	Karena Dampak Pandemi covid -19, kegiatan tetap dilaksanakan melalui virtual
Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi	700.000.000,00	677.117.000,00	96,73	Karena Dampak Pandemi covid-19 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2020 Pembatalan Keberangkat Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M
Penunjang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	2.865.000.000,00	149.978.000,00	5,23	-
Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021	50.000.000,00	5.800.000,00	11,60	-
Pengendalian Inflasi Daerah	73.040.000,00	1.140.000,00	1,56	-
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	60.000.000,00	0,00	0,00	
Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Anggaran tidak bisa diserap dikarenakan Perda belum selesai masih finalisasi pengesahan di Provinsi
Penyusunan Naskah Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pembinaan Kehumasan	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi Forum Pers	210.400.000,00	152.360.000,00	72,41	Karena dampak pandemi Covid-19 hanya beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	371.500.000,00	46.578.000,00	12,54	-
Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.000.000,00	84.000.000,00	38,36	Efisiensi anggaran
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	326.457.500,00	13,06	-
Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	39.600.000,00	9.185.000,00	23,19	Efisiensi anggaran
Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	150.000.000,00	85.200.000,00	56,80	Efisiensi anggaran
Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	178.080.000,00	0,00	0,00	
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Surveillance (Audit Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 DAN Standarisasi ISO	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Layanan Pengadaan Secara Elektronik	243.180.000,00	111.680.000,00	45,92	- Adanya proses pemilihan penyedia katalog elektronik pada LKPP Tahun 2020 yang menyebabkan proses pemilihan server LPSE tidak dapat diproses - Efisiensi
Penyelenggaraan Kegiatan TMMD	240.000.000,00	20.506.000,00	8,54	-
Pengendalian Pembangunan	82.927.000,00	1.180.000,00	1,42	-
Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	30.000.000,00	24.600.000,00	82,00	1. Narasumber tidak dapat hadir pada waktu yang sudah



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Kota Bekasi				ditentukan 2. Kegiatan dilaksanakan secara Zoom Meeting sehingga belanja makan minum rapat tidak dapat diserap 3. SPPD tidak dapat diserap karena koordinasi tidak dilaksanakan secara langsung (Kementerian PAN RB sedang dilockdown karena adanya pandemi Covid-19)
Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2019	21.194.000,00	331.200,00	1,56	-
Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bekasi	250.000.000,00	132.721.000,00	53,09	Karena dampak Pandemi Covid-19, sesuai protokol kesehatan tidak boleh mengadakan kerumunan masa hanya beberapa kegiatan dilaksanakan
Penyelenggaraan Penilaian RW Siaga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	273.600.000,00	100.200.000,00	36,62	Efisiensi anggaran
Pengendalian dan Evaluasi BUMD	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyusunan Kajian BUMD Persampahan	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pembangunan Sistem Pengendalian Barang Milik Daerah	114.360.000,00	12.894.000,00	11,27	Efisiensi anggaran
Pengadaan Sarana Mobilitas	4.200.000.000,00	9.000.000,00	0,21	-
Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	123.215.000,00	30.000.000,00	24,35	Efisiensi anggaran tidak melakukan pencetakan buku, dikarenakan data SHTnya dapat didownload langsung dari aplikasi e-SHT, sehingga tidak dilakukan penyerapan untuk alokasi cetak tersebut
Pengadaan Barang Inventaris Kantor	2.543.556.210,00	13.430.810,00	0,53	-
Pengadaan Meubelair	946.854.600,00	0,00	0,00	-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	TIDAK TERSERAP		HAMBATAN KENDALA
		Rp	(%)	
1	2	3	4	5
Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	<i>Refocusing</i> anggaran
Penyediaan Tiang Umbul-Umbul, Umbul-Umbul, Vitrase dan Tiang Bendera	138.000.000,00	2.056.500,00	1,49	-
Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	287.331.800,00	4.599.800,00	1,60	-

Berdasarkan tabel hambatan dan kendala pencapaian target diatas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya penyerapan anggaran atas target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan fiskal dan penganggaran oleh Pemerintah dalam rangka upaya penanganan dampak Pandemi Covid-19 melalui *refocusing* dan realokasi anggaran belanja non prioritas. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi sehingga dari 94 kegiatan hanya tersisa 60 kegiatan yang dilaksanakan,
2. Bahwa dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran maka beberapa kegiatan juga harus dijadwal ulang pelaksanaannya sehingga penyerapan anggarannya juga tidak maksimal (tidak mencapai target yang telah ditetapkan),
3. Adanya aturan-aturan dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) yang membatasi pelaksanaan kegiatan yang mengundang massa seperti rapat, sosialisasi, bimtek dsb. sehingga pelaksana kegiatan menerapkan efisiensi anggaran mengadakan kegiatan secara virtual atau zoom meeting.



BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

Laporan Keuangan Tahun 2020 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Sedangkan SIMDA BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

3.1 Basis Akuntansi

Sekretariat Daerah Kota Bekasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan*.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- h. Surplus/Defisit-LRA;
Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Akun pada Neraca terdiri dari :

2.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.2 Piutang (*JIKA SKPD MEMILIKI PIUTANG*)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

2.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

- a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :
 - 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
 - 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerntah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

b. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
 - b) Upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.
- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :

- 1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :

(a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

(b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - (d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - (1) Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- a. Beban penyisihan piutang;
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

2.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :

- a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluarsa/rusak.
 - b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.

2.5 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai perolehannya tidak didapat maka dapat mempergunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.

2.6 Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2.8 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

- kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
 3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
 4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
 5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
 6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
 7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
-



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tata cara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarentya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

15. Perbaikan tersebut meliputi :

- a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
- b. Perbaikan software/aplikasi yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

2.9 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, missal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban bebanyang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



BAB IV
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

4.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

LRA Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi belanja dan pembiayaan. LRA Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini tidak menyajikan unsur pendapatan karena tidak adanya pendapatan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan bukan salah satu perangkat daerah penghasil.

4.1.1	Belanja	<u>31 DESEMBER 2020</u> Rp100.918.515.310,00	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp89.575.007.744,00
--------------	----------------	---	--

Realisasi belanja daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp100.918.515.310,00 dan Rp89.575.007.744,00 atau sebesar 88,52% pada Tahun 2020 dan 73,64% pada Tahun 2019, apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp114.010.397.330,00 dan Rp121.644.930.696,00. Terdapat pos-pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp13.091.882.020,00 dan Rp32.069.922.952,00. Perincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.1
Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
5.1	Belanja Operasi	105.907.115.664,00	93.009.557.310,00	87,82	88.722.681.744,00
5.2	Belanja Modal	8.103.281.666,00	7.908.958.000,00	97,60	852.326.000,00
	Jumlah	114.010.397.330,00	100.918.515.310,00	88,52	89.575.007.744,00

4.1.1.1 Belanja Operasi **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp93.009.557.310,00 **Rp88.722.681.744,00**

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2020 dan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp105.907.115.664,00 dan Rp120.458.884.196,00 direalisasikan sebesar Rp93.009.557.310,00 atau 87,82% dan Rp88.722.681.744,00 atau 73,65% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Belanja Operasi

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
5.1.1	Belanja Pegawai	51.868.116.700,00	46.263.898.544,00	89,20	42.624.016.642,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.038.998.964,00	46.745.658.766,00	86,50	46.098.665.102,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah	105.907.115.664,00	93.009.557.310,00	87,82	88.722.681.744,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.1.1.1.1 Belanja Pegawai **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp46.263.898.544,00 **Rp42.624.016.642,00**

Pada tahun 2020 dan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp51.868.116.700,00 dan Rp57.418.617.000,00 terealisasi Rp46.263.898.544,00 dan Rp42.624.016.642,00 atau sebesar 89,20% dari target tahun 2020 dan sebesar 74,23% dari target tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Belanja Pegawai per Rekening

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.009.839.300,00	13.694.891.577,00	95,65	13.399.766.233,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	33.976.742.400,00	28.944.266.967,00	85,19	26.259.841.409,00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	25.635.000,00	0,00	0,00	33.089.000,00
5.1.1.10	Honorarium PNS	96.900.000,00	80.300.000,00	82,87	69.750.000,00
5.1.1.11	Honorarium Non PNS	3.759.000.000,00	3.544.440.000,00	94,29	2.861.570.000,00
	Jumlah	51.868.116.700,00	46.263.898.544,00	89,20	42.624.016.642,00

4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp46.745.658.766,00 **Rp46.098.665.102,00**

Pada Tahun 2020 dan 2019 dianggarkan sebesar Rp54.038.998.964,00 dan Rp Rp63.040.267.196,00 terealisasi Rp46.745.658.766,00 dan Rp46.098.665.102,00 atau sebesar 86,50% dari target Tahun 2020 dan sebesar 73,13% dari target Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut :



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.4
Belanja Barang dan Jasa per Rekening

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.950.344,00	673.328.800,00	70,29	658.867.035,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	1.545.525.000,00	1.252.514.000,00	81,04	1.389.085.500,00
5.1.2.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.408.500,00	1.008.927.300,00	70,93	750.085.700,00
5.1.2.04	Belanja Makanan dan Minuman	3.493.179.500,00	2.508.624.500,00	71,81	1.862.393.200,00
5.1.2.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	191.240.000,00	168.600.000,00	88,16	140.900.000,00
5.1.2.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	274.837.000,00	270.580.000,00	98,45	243.435.000,00
5.1.2.08	Belanja Barang Inventaris Non Aset	366.942.000,00	330.896.500,00	90,18	154.000.000,00
5.1.2.11	Belanja Hadiah	31.200.000,00	7.800.000,00	25,00	217.405.000,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.430.505.000,00	697.654.692,00	48,77	538.470.751,00
5.1.2.16	Belanja Jasa Kantor	5.967.497.000,00	5.477.604.806,00	91,79	6.033.564.482,00
5.1.2.18	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	799.300.000,00	695.537.300,00	87,02	749.753.500,00
5.1.2.19	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.074.276.000,00	620.705.200,00	57,78	254.500.000,00
5.1.2.20	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	364.400.000,00	150.702.000,00	41,36	2.900.000,00
5.1.2.22	Belanja Sewa Sarana, Perlengkapan dan Peralatan	599.100.000,00	262.816.000,00	43,87	584.416.000,00
5.1.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	181.500.000,00
5.1.2.28	Belanja Jasa Konsultansi	257.515.000,00	205.757.500,00	79,90	364.780.000,00
5.1.2.29	Belanja Jasa Lainnya	178.020.000,00	152.144.000,00	85,46	116.000.000,00
5.1.2.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	15.268.419.000,00	14.791.409.636,00	96,88	13.437.768.675,00
5.1.2.35	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	9.780.000,00
5.1.2.37	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	542.500.000,00	122.500.000,00	22,58	174.000.000,00
5.1.2.39	Belanja Pemeliharaan	18.736.487.300,00	17.047.206.532,00	90,98	17.936.460.259,00
5.1.2.40	Belanja Honorarium PNS	137.800.000,00	48.100.000,00	34,91	22.800.000,00
5.1.2.41	Belanja Honorarium Non PNS	220.700.000,00	138.250.000,00	62,64	275.800.000,00
5.1.2.44	Belanja Efisiensi	65.197.320,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	54.038.998.964,00	46.745.658.766,00	86,50	46.098.665.102,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Rekening

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
5.2.2.01	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	765.700.000,00
5.2.2.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.200.000.000,00	4.191.000.000,00	99,79	-
5.2.2.14	Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	61.976.000,00
5.2.2.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga	537.276.300,00	536.076.300,00	99,78	0,00
5.2.2.16	Pengadaan Komputer	2.942.217.666,00	2.800.094.000,00	95,17	24.650.000,00
5.2.2.17	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	272.778.300,00	272.778.300,00	100,00	-
5.2.2.18	Pengadaan Alat Studio	109.009.400,00	109.009.400,00	100,00	0,00
5.2.2.35	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	8.061.281.666,00	7.908.958.000,00	98,11	852.326.000,00

4.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp 0,00 **Rp0,00**

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp42.000.000,00 dan Rp220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dan Rp0,0 atau sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Rekening

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
5.2.3.01	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

4.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Posisi Keuangan per 31 Desember 2020 Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara umum sebagai berikut:

Tabel 4.8
POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE REKENING	POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
1	Aset	153.001.364.127,83	144.344.411.013,03
2	Kewajiban	420.528.597,00	1.485.977.357,00
3	Ekuitas	152.580.835.530,83	142.858.433.656,03

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp153.001.364.127,83 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp813.229.566,67 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp151.924.470.289,00 serta Aset lainnya sebesar Rp263.664.272,16.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp420.528.597,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp420.528.597,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp152.580.835.530,83.

4.2.1	Aset	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
		Rp153.001.364.127,83	Rp144.344.411.013,03

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp153.001.364.127,83 Sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp144.344.411.013,03, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
REKAPITULASI ASET
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE REKENING	JENIS ASET	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
1.1	Aset Lancar	813.229.566,67	632.332.716,67
1.2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
1.3	Aset Tetap	151.924.470.289,00	143.448.414.024,20
1.5	Aset Lainnya	263.664.272,16	263.664.272,16
	Total	153.001.364.127,83	144.344.411.013,03

4.2.1.1 Aset Lancar **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp813.229.566,67 **Rp632.332.716,67**

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki atau untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebesar **Rp813.229.566,67**.

4.2.1.1.1 Kas **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

Berdasarkan berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas pada Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Kota Bekasi per 31 Desember 2020 terdapat saldo kas sebesar **Rp0,00**, terdiri dari kas tunai **Rp0,00** dan Kas di Bank sebesar **Rp0,00**.

4.2.1.1.2	Beban Dibayar Dimuka	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
		Rp391.237.666,67	Rp229.166.666,67

Belanja dibayar di muka merupakan pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memanfaatkannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Saldo Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp391.237.666,67 terdiri dari :

1. Saldo senilai Rp229.166.666,67 merupakan saldo beban dibayar dimuka Sewa Gedung / Kantor / Tempat untuk Kantor Bawaslu Kota Bekasi sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 010/1196-Setda.Um tanggal 9 Desember 2020, SP2D No. 10827/SP2D/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp250.000.000,00 berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2021
2. Saldo senilai Rp162.071.000,00 merupakan saldo beban dibayar dimuka Sewa Gudang/Lahan untuk Logistik KPU Kota Bekasi, sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 010/1020-Setda.Um tanggal 19 Oktober 2020, SP2D No. 10610/SP2D/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp194.485.200,00 berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal 19 Oktober 2020 s/d 19 Oktober 2021.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.2.1.1.3 Persediaan **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp421.991.900,00 **Rp403.166.050,00**

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Penghitungan nilai persediaan dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out). Saldo Persediaan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi tersebut per 31 Desember 2020 sebesar Rp421.991.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Persediaan

dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	SALDO
1.1.7.1.3	Alat/bahan Kegiatan Kantor	320.431.900,00
1.1.7.1.4	Obat-Obatan	0,00
1.1.7.1.5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	101.560.000,00
	JUMLAH	421.991.900,00

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Penyesuaian Klasifikasi **Alat/bahan Kegiatan Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebesar Rp320.431.900,00** terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp19.279.500,00, Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar Rp173.283.000,00, Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp0,00, Persediaan Barang Cetakan sebesar Rp70.078.500,00, Persediaan Pakai Habis Pelayanan Kesehatan sebesar Rp0,00, Persediaan Pakai Habis Perlengkapan Komputer/Printer sebesar Rp56.377.100,00 dan Persediaan Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor sebesar Rp1.413.800,00.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Persediaan Obat-obatan sebesar Rp0,00. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp101.560.000,00 terdiri dari Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp101.560.000,00 dan Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp0,00

4.2.1.2 Aset Tetap 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Rp151.924.470.289,00 Rp143.448.414.024,20

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2020 sebesar **Rp151.924.470.289,00** Sedangkan pada tahun 2019 sebesar **Rp143.448.414.024,20**. Adapun perbandingan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.11
REKAPITULASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE REKENING	JENIS ASET TETAP	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
1.3.1	Tanah	7.536.333.930,00	7.536.333.930,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	38.891.966.464,74	37.397.519.843,74
1.3.3	Gedung dan Bangunan	158.374.978.238,00	158.086.874.262,00
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.437.666.957,00	4.437.666.957,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	320.752.500,00	320.752.500,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(57.637.227.800,74)	(64.330.733.468,54)
	Total	151.924.470.289,00	143.448.414.024,20

Selama Tahun 2020 mutasi aset tetap sebagai berikut:

Penambahan:

- Mutasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari DISPERKIMTAN atas Rekomendasi BPK bulan Januari sebesar Rp169.221.000,00
- Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp7.908.958.000,00
- Mutasi Masuk dari OPD Lain sebesar Rp1.943.071.147,00
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp200.839.000,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.13
REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	PERALATAN MESIN	JUMLAH (Rp)
1	SALDO AWAL 1 Januari 2020		37.397.519.843,74
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL 2020	7.908.958.000,00
		MUTASI MASUK DARI OPD LAIN	1.824.188.171,00
		REKLAS DARI BELANJA PEMELIHARAAN	200.839.000,00
2	JUMLAH MUTASI TAMBAH		9.933.985.171,00
	MUTASI KURANG	MUTASI KELUAR KE OPD LAIN	8.162.848.550,00
		EKSTRACOMPATABLE	1.690.000,00
		REKLAS KE ASET LAINNYA	275.000.000,00
3	JUMLAH MUTASI KURANG		8.439.538.550,00
4	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020		38.891.966.464,74

Tabel 4.14
PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2020

PENYESUAIAN PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2016		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.3.2	Peralatan dan Mesin	38.891.966.464,74
1.3.2.1	Alat Besar	498.193.000,00
1.3.2.2	Alat Angkutan	17.420.203.480,20
1.3.2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	23.970.000,00
1.3.2.4	Alat Pertanian	200.589.000,00
1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.007.570.823,42
1.3.2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	900.888.427,00
1.3.2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
1.3.2.8	Alat Laboratorium	1.047.680.600,00
1.3.2.9	Alat Persenjataan	0,00
1.3.2.10	Komputer	6.522.320.734,12
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	0,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	0,00
1.3.2.16	Alat Peraga	0,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	0,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	237.671.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	32.879.400,00

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp158.374.978.238,00 **Rp158.086.874.262,00**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp158.374.978.238,00 dan Rp158.086.874.262,00. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.15
REKAPITULASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	SIMDA KEUANGAN	SIMDA BMD
			JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SALDO per 31 Desember 2019		Rp158.086.874.262,00	158.256.095.262,00
	MUTASI TAMBAH	MUTASI MASUK DARI DISPERKIMTAN ATAS REKOMENDASI BPK BULAN JANUARI 2020	169.221.000,00	0,00
2	SALDO 1 JANUARI 2020		158.256.095.262,00	158.256.095.262,00
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL 2020		
		MUTASI MASUK DARI DISKOP UKM	118.882.976,00	118.882.976,00
3	JUMLAH MUTASI TAMBAH		118.882.976,00	118.882.976,00
	MUTASI KURANG	PINDAH KIB	0,00	0,00
4	JUMLAH MUTASI KURANG		0,00	0,00
5	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020		158.374.978.238,00	158.374.978.238,00

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)

Untuk Mutasi atau Transfer Masuk Aset Tetap dari DISPERKIMTAN pada SIMDA Keuangan tahun 2020 atas Rekomendasi BPK sudah tercatat dengan melakukan Jurnal Umum Penyesuaian bulan Januari 2020.



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.16
GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2020

PENYESUAIAN PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2016		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.3.3	Gedung dan Bangunan	158.374.978.238,00
1.3.3.1	Bangunan Gedung	158.179.988.238,00
1.3.3.2	Monumen	194.990.000,00
1.3.3.3	Bangunan Menara	0,00
1.3.3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)

4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp4.437.666.957,00 **Rp4.437.666.957,00**

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masih sebesar **Rp4.437.666.957,00**. Tidak ada kenaikan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2020, nilai saldo tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2019.

Tabel 4.17
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
PER 31 DESEMBER 2020

PENYESUAIAN PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2016		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.437.666.957,00
1.3.4.1	Jalan dan Jembatan	45.565.000,00
1.3.4.2	Bangunan Air	157.367.000,00
1.3.4.3	Instalasi	1.230.177.300,00
1.3.4.4	Jaringan	3.004.557.657,00

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp320.752.500,00	Rp320.752.500,00

Aset Tetap Lainnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masih sebesar **Rp320.752.500,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset tetap lainnya yang berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.18
ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020

PENYESUAIAN PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2016		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	320.752.500,00
1.3.5.1	Bahan Perpustakaan	254.424.000,00
1.3.5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	66.328.500,00
1.3.5.3	Hewan	0,00
1.3.5.4	Biota Perairan	0,00
1.3.5.5	Tanaman	0,00
1.3.5.6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
1.3.5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.2.1.2.6	Aset Tetap	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Konstruksi dalam	Rp0,00	Rp0,00
	Pengerjaan		

Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
REKAPITULASI ASET TETAP
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH (Rp)
1	SALDO AWAL 1 Januari 2020		0,00
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL 2020	0,00
		PINDAH KIB	0,00
2	JUMLAH MUTASI TAMBAH		0,00
	MUTASI KURANG	PINDAH KIB	0,00
3	JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
4	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020		0,00

Tabel 4.20
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2020

PENYESUAIAN PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2016		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
1.3.6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp(57.637.227.800,74) **Rp(64.330.733.468,54)**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar (Rp57.637.227.800,74), dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(57.637.227.800,74)
1.3.7.1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(27.635.053.894,74)
1.3.7.1.1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(408.989.428,00)
1.3.7.1.2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(9.735.783.542,20)
1.3.7.1.3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	(21.987.334,00)
1.3.7.1.4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(172.973.218,00)
1.3.7.1.5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(10.536.806.959,42)
1.3.7.1.6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(866.123.411,00)
1.3.7.1.8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(33.922.947,00)
1.3.7.1.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(5.620.796.055,12)
1.3.7.1.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(237.671.000,00)
1.3.7.2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(26.209.986.380,00)
1.3.7.2.1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(26.196.580.818,00)
1.3.7.2.2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(13.405.562,00)
1.3.7.3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(3.792.187.526,00)
1.3.7.3.1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(45.565.000,00)
1.3.7.3.2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(102.944.246,00)
1.3.7.3.3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(639.120.623,00)
1.3.7.3.4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.004.557.657,00)
1.3.7.4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.3.7.4.1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-

Sumber Data : SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

4.2.1.3 Aset Lainnya **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp263.664.272,16 **Rp263.664.272,16**

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2020 bahwa jumlah aset lainnya pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebesar **Rp263.664.272,16** yang merupakan nilai dari aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.22
REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE REKENING	JENIS ASET LAINNYA	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	6,00	6,00
1.5.4	Aset Lain-lain	1.352.084.471,16	1.077.084.471,16
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.088.420.205,00)	(813.420.205,00)
	Total	263.664.272,16	263.664.272,16

Tabel 4.23
ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020

PENYESUAIAN PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2016		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.5	Aset Lainnya	263.664.272,16
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	0,00
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud (nilai perolehan)	1.787.927.000,00
1.5.4	Aset Lain-lain	1.352.084.471,16
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.787.926.994,00)
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.088.420.205,00)

Sumber Data : - Pengurus Barang Pengguna
- SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019 Rp6,00 Rp6,00

Aset tidak berwujud Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masih tercatat sebesar **Rp6,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset tidak berwujud berupa software. Tidak ada kenaikan nilai Aset Tidak Berwujud pada tahun 2020, Nilai saldo tersebut merupakan saldo nilai Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2019.

Aset Tidak Berwujud (nilai perolehan)	1.787.927.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.787.926.994,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2020	6,00

4.2.1.3.2 Aset Lain-lain 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019 Rp1.352.084.471,16 Rp1.077.084.471,16

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset lain-lain yang berupa *reclass* dari aset tetap yang sudah rusak berat atau telah dilakukan usulan penghapusan. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebesar **Rp1.352.084.471,16** Berikut perincian aset lain-lain:

Saldo Akhir Tahun 2019/Awal Tahun 2020		Rp 1.077.084.471,16
Mutasi Tambah		Rp 275.000.000,00
Usulan Penghapusan dan <i>reclass</i> ke aset lain-lain (reklasifikasi aset tetap dari peralatan mesin)	Rp 275.000.000,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2020		Rp 1.352.084.471,16

Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna dan Bidang Aset BPKAD



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

4.2.1.3.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<u>31 DESEMBER 2020</u> Rp(1.088.420.205,00)	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp(813.420.205,00)
------------------	--	---	---

Akumulasi Aset Lain-lain merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset Tetap yang dipindah ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan lagi. Nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp(1.088.420.205,00) dan Rp(813.420.205,00).

4.2.2	Kewajiban	<u>31 DESEMBER 2020</u> Rp420.528.597,00	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp1.485.977.357,00
--------------	------------------	---	---

Nilai kewajiban Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp420.528.597,00 dan Rp1.485.977.357,00. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada Tahun 2020 nilai masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut :

- Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp420.528.597,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp1.485.977.357,00 dan;
- Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

4.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 DESEMBER 2020</u> Rp420.528.597,00	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp1.485.977.357,00
----------------	--	---	---

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, nilai total pada Tahun 2020 sebesar Rp420.528.597,00. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Kewajiban Jangka Pendek

dalam Rupiah

Kode Rekening	Kewajiban Jangka Pendek	2020	2019
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Utang Pokok)	0,00	0,00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5	Utang Beban	420.528.597,00	1.485.977.357,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		420.528.597,00	1.485.977.357,00

4.2.2.1.1 Utang Beban **31 Desember 2020** **31 Desember 2019**
Rp420.528.597,00 **Rp1.485.977.357,00**

Akun Utang Belanja/Utang Beban merupakan akun yang mencatat beban yang masih harus dibayar sehubungan dengan manfaat/barang telah diterima namun hingga penyusunan laporan keuangan ini belum dibayar.

Utang Beban pada neraca Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 tercatat sebesar **Rp420.528.597,00**. Utang beban ini terdiri atas utang beban barang dan jasa yaitu utang beban listrik, telepon, air, internet, dan koran/majalah dengan rincian sebagai berikut:



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.25
Utang Beban

JENIS UTANG BEBAN	JUMLAH (Rp)
Utang Beban Listrik, Telepon, Air, Internet dan Koran/Majalah	
- Beban Jasa Telepon	1.117.779,00
- Beban Jasa Air	6.890.400,00
- Beban Jasa Listrik	410.577.446,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet	1.942.972,00
Total	420.528.597,00

4.2.2.1.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Utang jangka pendek lainnya Sekretariat daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2.3	Ekuitas	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
		Rp152.580.835.530,83	Rp142.858.433.656,03

Ekuitas adalah kekayaan bersih Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp152.580.835.530,83.

4.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.3.1 BEBAN-LO 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019 Rp96.920.676.168,20 Rp95.018.055.854,66

Beban-LO diakui dan dicatat pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pada Tahun 2020 beban-LO terealisasi sebesar Rp96.920.676.168,20 dan Tahun 2019 sebesar Rp95.018.055.854,66 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.26
Beban –LO

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
9.1	Beban operasi	96.920.676.168,20	95.018.055.854,66
9.2	Beban transfer		0,00
9.3	Defisit Non Operasional		0,00
9.4	Beban luar biasa		0,00
	Beban	96.920.676.168,20	95.018.055.854,66

4.3.1.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Rp96.920.676.168,20 Rp95.018.055.854,66

Tabel 4.27
Beban Operasi

dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian Beban Operasi	Tahun 2020	Tahun 2019
9.1.1	Beban Pegawai - LO	57.717.224.094,00	42.543.905.155,00
9.1.2	Beban Persediaan	1.453.218.300,00	1.313.163.350,00
9.1.3	Beban Jasa	9.552.105.632,00	21.728.498.748,66
9.1.4	Beban Barang	5.346.969.800,00	3.977.071.135,00
9.1.5	Beban Pemeliharaan	16.771.142.532,00	17.527.585.609,00
9.1.6	Beban Perjalanan Dinas	697.654.692,00	465.053.381,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

9.1.9	Beban Hibah	0,00	0,00
9.1.11	Beban Penyusutan	5.382.361.118,20	7.462.778.476,00
9.1.12	Beban Amortisasi	0,00	0,00
Jumlah		96.920.676.168,20	95.018.055.854,66

4.3.1.1.1 **Beban Pegawai** **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019** **- LO** **Rp57.717.224.094,00** **Rp42.543.905.155,00**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp57.717.224.094,00 dan Rp42.543.905.155,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perincian Beban Pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.28
Beban Pegawai - LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	13.694.891.577,00	13.393.993.746,00
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	28.944.266.967,00	26.259.841.409,00
9.1.1.07	Beban Uang Lembur – LO	0,00	0,00
9.1.1.11	Beban Honorarium PNS	80.300.000,00	28.500.000,00
9.1.1.12	Beban Honorarium Non PNS	14.997.765.550,00	2.861.570.000,00
Jumlah		57.717.224.094,00	42.543.905.155,00

4.3.1.1.2 **Beban** **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019** **Persediaan** **Rp1.453.218.300,00** **Rp1.313.163.350,00**

Jumlah beban persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.453.218.300,00 dan Rp1.313.163.350,00. Beban



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

persediaan merupakan beban yang mencatat pemakaian atas persediaan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.29
Beban Persediaan per Jenis Barang

KODE REKENING	URAIAN	2020	2019
9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	168.940.250,00	124.003.950,00
9.1.2.01.03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.172.000,00	187.404.200,00
9.1.2.01.04	Beban Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	546.000,00	798.000,00
9.1.2.01.05	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	43.566.000,00	-
9.1.2.01.08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	-	-
9.1.2.01.11	Beban Persediaan Pakai Habis Pelayanan Kesehatan	267.675.600,00	
9.1.2.01.12	Beban Persediaan Obat-obatan	1.554.000,00	
9.1.2.01.14	Beban Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	134.102.500,00	294.220.000,00
9.1.2.01.15	Beban Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	165.897.000,00	9.780.000,00
9.1.2.01.17	Beban Persediaan Inventaris Peralatan / Perlengkapan Kebersihan		-
9.1.2.01.18	Beban Persediaan Perlengkapan Komputer / Printer	196.986.300,00	204.158.600,00
9.1.2.02.06	Beban Persediaan Makanan Pokok	19.176.750,00	
9.1.2.03.01	Beban Persediaan Cetak	258.847.700,00	484.236.100,00
9.1.2.04.01	Beban Persediaan Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor	175.754.200,00	
9.1.2.05.01	Beban Persediaan Kadaluarsa/Rusak - Cetakan		8.562.500,00
	Total	1.453.218.300,00	1.313.163.350,00

Tabel 4.30
RINCIAN PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
<i>1</i>	<i>Beban Persediaan Alat Tulis Kantor</i>		<i>168.940.250,00</i>
	- Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2020	8.483.050,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	179.736.700,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	19.279.500,00	



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

2	<i>Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</i>		20.172.000,00
	- Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2020	44.074.000,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	149.381.000,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	173.283.000,00	
3	<i>Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya</i>		546.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	546.000,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	0,00	
4	<i>Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>		43.566.000,00
	- Transfer Masuk dari sumber dana Belanja Tidak Terduga	41.814.000,00	
	- Transfer Masuk dari sumber dana Hibah / Donasi / Sumbangan / CSR (COVID)	1.752.000,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	0,00	
5	<i>Beban Persediaan Pakai Habis Pelayanan Kesehatan</i>		267.675.600,00
	- Transfer Masuk dari sumber dana Belanja Tidak Terduga	194.378.500,00	
	- Transfer Masuk dari sumber dana Hibah / Donasi / Sumbangan / CSR (COVID)	73.297.100,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	0,00	
6	<i>Beban Persediaan Obat-Obatan</i>		1.554.000,00
	- Transfer Masuk dari sumber dana Hibah / Donasi / Sumbangan / CSR (COVID)	1.554.000,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	0,00	
7	<i>Beban Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga</i>		134.102.500,00
	- Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2020	235.662.500,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	0,00	
	- Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2020	101.560.000,00	
8	<i>Beban Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat</i>		165.897.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	18.000.000,00	
	- Transfer Masuk dari sumber dana Belanja Tidak Terduga	147.897.000,00	
9	<i>Beban Persediaan Pakai Habis Perlengkapan Komputer/Printer</i>		196.986.300,00
	- Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2020	60.112.300,00	



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	2020	2019
9.1.3.07	Beban Sewa Sarana, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	262.816.000,00	467.811.000,00
9.1.3.09	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	96.000.000,00	181.500.000,00
9.1.3.12	Beban Jasa Konsultansi	205.757.500,00	364.780.000,00
9.1.3.13	Beban Jasa Lainnya	152.144.000,00	116.000.000,00
9.1.3.14	Beban Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	2.322.782.500,00	13.656.850.261,00
9.1.3.19	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	122.500.000,00	174.000.000,00
9.1.3.20	Beban Honorarium PNS	48.100.000,00	18.700.000,00
9.1.3.21	Beban Honorarium Non PNS	138.250.000,00	178.600.000,00
	JUMLAH	9.552.105.632,00	21.728.498.748,66

4.3.1.1.4 Beban Barang 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019 Rp5.346.969.800,00 Rp3.977.071.135,00

Jumlah beban barang pada Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.346.969.800,00 dan Rp3.977.071.135,00. Beban barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.32
Beban Barang Per Obyek

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
9.1.4.01	Beban Makanan dan Minuman	2.508.624.500,00	1.754.203.200,00
9.1.4.02	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	168.600.000,00	140.900.000,00
9.1.4.04	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	270.580.000,00	84.575.000,00
9.1.4.05	Beban Barang Inventaris Non Aset	44.010.000,00	0,00
9.1.4.08	Beban Pakai Habis Peralatan/Perlengkapan	27.005.000,00	-
9.1.4.09	Beban Barang Inventaris Non Aset	345.568.500,00	-
9.1.4.11	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	489.900.500,00	468.150.800,00
9.1.4.12	Beban Barang Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	2.800.000,00



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.34
Beban Perjalanan Dinas per Rincian Obyek

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
9.1.6.01.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176.700.000,00	0,00
9.1.6.01.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	520.954.692,00	465.053.381,00
9.1.6.01.03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
	Jumlah	697.654.692,00	465.053.381,00

4.3.1.1.7 **Beban** **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Penyusutan **Rp5.382.361.118,20** **Rp7.462.778.476,00**

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.382.361.118,20 dan Rp7.462.778.476,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tabel 4.35
Beban Penyusutan per Obyek

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
9.1.11.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.004.680.084,20
9.1.11.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.309.702.286,00
9.1.11.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.978.748,00
	Total	5.382.361.118,20

Sumber Data : SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)

4.3.1.1.8 **Beban** **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Amortisasi **Rp0,00** **Rp0,00**

Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

4.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	<u>31 DESEMBER 2020</u> Rp5.724.562.733,00	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp(1.203.103.254,00)
--------------	--	---	---

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.724.562.733,00 dan Rp(1.203.103.254,00). Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.36
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi nilai persediaan	
2	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	
3	Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar	5.724.562.733,00
	Jumlah	5.724.562.733,00

Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :

1. Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar sebesar Rp5.724.562.733,00

Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar terjadi akibat adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per 31 Desember 2020. Adapun nilai koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar untuk masing-masing akun dapat dirinci pada tabel berikut :



Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Dengan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya pada Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 telah dapat dipenuhi, walaupun banyak sekali hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang sudah ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penganggaran dengan diadakannya revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bekasi, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH



Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002